

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 PIAUD



LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

2025

A. Kriteria Audit

Kategori	No	Standar
Pendidikan	1	Standar Luaran Pendidikan
	2	Standar Proses Pendidikan
	3	Standar Masukan Pendidikan
Penelitian	4	Standar Luaran Penelitian
	5	Standar Proses Penelitian
	6	Standar Masukan Penelitian
PKM	7	Standar Luaran PkM
	8	Standar Proses PkM
	9	Standar Masukan PkM

B. Rincian Temuan dan upaya tindak lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
1	Prodi PIAUD belum melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan, dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen hasil survei kepuasan pengguna lulusan pada arsip Prodi, yang tidak sesuai dengan SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Koordinasi dengan pak Syafi'i sebagai PIC tracer study	Program Studi PIAUD berkoordinasi dengan unit Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Survey untuk memperoleh hasil Kepuasan Pengguna Lulusan
2	Prodi PIAUD belum melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan, dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen hasil survei kepuasan pengguna lulusan pada arsip Prodi, yang tidak sesuai dengan SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Berkoordinasi dengan PIC Tracer Study	Program Studi PIAUD berkoordinasi dengan unit Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Survey untuk memperoleh hasil rata-rata tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
3	Program Studi PIAUD belum memiliki kebijakan antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa dalam kegiatan akademik, dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen kebijakan antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa di tingkat Prodi serta belum tersedianya kebijakan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi membuat SOP berkenaan dengan anti deskriminasi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan antidiskriminasi dan perlindungan mahasiswa, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya di tingkat Prodi

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
4	Program Studi PIAUD belum memiliki kebijakan keamanan dan antikekerasan pada seluruh civitas, dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen kebijakan keamanan dan antikekerasan di tingkat Prodi, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Mendorong pembuatan SOP yang memuat jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan keamanan dan antikekerasan, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya di tingkat Prodi
5	Penyelesaian studi di Prodi PIAUD belum dilaksanakan secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penyelesaian studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) , serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya di tingkat Prodi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penyelesaian studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) , serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya di tingkat Prodi
6	Program Studi PIAUD belum memiliki kebijakan semester antara, dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen kebijakan semester antara di tingkat Prodi, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan semester antara, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan semester antara, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya
7	Prodi PIAUD tidak memiliki mekanisme pembelajaran di luar prodi, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan pembelajaran di luar prodi, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan pembelajaran di luar prodi, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya
8	Mekanisme pengakuan beban dan hasil belajar (RPL/transfer) untuk pembelajaran di luar program studi/ perguruan tinggi telah direncanakan, namun hingga saat ini kegiatan pembelajaran luar prodi/PT belum terlaksana.	Membuat rekap pelaksanaan luar prodi	Menyiapkan dan menetapkan MoU/SPK, kurikulum, serta SOP RPL/transfer, serta mulai mengimplementasikan pembelajaran luar prodi/PT dengan penetapan pembimbing dan pencatatan kredit pada SIAKAD.
9	Belum tersedia bukti penilaian dan konversi SKS yang jelas untuk kegiatan pembelajaran luar prodi/PT (MBKM), meskipun rencana implementasi telah ada.	Belum ada konversi sks yang jelas dalam MBKM	Menyusun dan menetapkan pedoman serta instrumen penilaian dan konversi SKS MBKM, serta mengintegrasikannya ke dalam SIAKAD untuk menjamin pengakuan hasil belajar mahasiswa.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
10	Program Studi PIAUD belum mengimplementasikan program MKBM, dibuktikan dengan tidak ditemukannya bukti kegiatan MBKM di tingkat Prodi, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi menyusun dan menetapkan SOP dan mekanisme pelaksanaan MBKM, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya	Institusi menyusun dan menetapkan SOP dan mekanisme pelaksanaan MBKM, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya
11	Tidak ditemukan bukti adanya pemilihan dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis secara individu/berkelompok) atau mengikuti kurikulum berbasis proyek/pembelajaran di Prodi PIAUD, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan penyelesaian tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis secara individu/berkelompok) atau mengikuti kurikulum berbasis proyek/pembelajaran, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan penyelesaian tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis secara individu/berkelompok) atau mengikuti kurikulum berbasis proyek/pembelajaran, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya
12	Tidak ditemukan bukti adanya pedoman pengelolaan pendidikan di Prodi PIAUD, hal ini tidak sesuai dengan Standar SN-Dikti dan Standar SPMI Perguruan Tinggi	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya	Institusi menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan, serta Program Studi PIAUD menyesuaikan dan mengimplementasikannya
13	Belum tersedia panduan orientasi mahasiswa yang secara sistematis memuat penguatan nilai integritas akademik serta upaya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi perlu menyusun dan menetapkan panduan orientasi mahasiswa yang terstruktur dan komprehensif, mencakup materi integritas akademik dan pencegahan kekerasan, serta memastikan implementasinya melalui sosialisasi dan evaluasi berkala.	Perguruan tinggi perlu menyusun dan menetapkan panduan orientasi mahasiswa yang terstruktur dan komprehensif, mencakup materi integritas akademik dan pencegahan kekerasan, serta memastikan implementasinya melalui sosialisasi dan evaluasi berkala.
14	Belum ada SOP pelaporan PDDIKTI di Prodi PIAUD, namun kegiatan sudah dilaksanakan	Meminta laporan PD Dikti Prodi tiap semester	Berkoordinasi dengan PT dalam penyusunan SOP pelaporan PDDIKTI
15	Data dan informasi publik telah tersedia melalui website perguruan tinggi dan program studi. Website fakultas masih dalam tahap perancangan, dengan draft menu sudah tersedia dan menunggu proses pengembangan oleh PUSDATIN.	Koordinasi dengan pusdatin dalam pembuatan website	Mempercepat pengembangan dan peluncuran website fakultas serta memastikan informasi yang disajikan mutakhir dan mudah diakses publik.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
16	Perguruan tinggi telah memiliki pedoman masa studi mahasiswa dan telah disosialisasikan kepada sivitas akademika. Namun, pedoman tersebut belum mengatur secara spesifik perbedaan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.	Perguruan tinggi perlu menyusun dan menetapkan panduan orientasi mahasiswa yang terstruktur dan komprehensif, mencakup materi integritas akademik dan pencegahan kekerasan, serta memastikan implementasinya melalui sosialisasi dan evaluasi berkala.	Melakukan penyempurnaan pedoman masa studi dengan pengaturan yang spesifik bagi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu serta memastikan implementasinya secara konsisten.
17	Saat ini DTPS yang memiliki kualifikasi pendidikan terakhir S3 belum mencapai 25% total DTPS. Terdapat 1 orang DTPS yang sedang dalam proses studi lanjut jenjang S3.	Mendorong dosen untuk melanjutkan studi dan penyelesaian tugas akhir dosen yang sedang studi lanjut	Perguruan tinggi perlu meningkatkan dukungan terhadap DTPS untuk melanjutkan studi S3 melalui pemberian beasiswa, kemudahan izin belajar, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan.
18	Saat ini DTPS belum memiliki dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Prodi telah menyusun proyeksi pemenuhan minimal 1 Lektor Kepala.	Mendorong pemenuhan persyaratan pengajuan LK	Mendorong dan memfasilitasi percepatan pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala sesuai proyeksi yang telah ditetapkan.
19	Sarana dan prasarana perguruan tinggi telah memadai untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Namun, belum tersedia sarana dan prasarana khusus yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.	Penyiapan sarpras untuk disabilitas	Menyusun perencanaan dan penganggaran penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas sesuai standar aksesibilitas.
20	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman Sistem K3 dan belum dilakukan sosialisasi kepada civitas akademika.	Menjadi masukan untuk institusi	Menyusun dan menetapkan pedoman Sistem K3 serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada civitas akademika.
21	DTPS telah melaksanakan penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi/mandiri dan dana dalam negeri. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian DTPS yang didanai oleh sumber luar negeri.	Mencari sumber pendanaan luar negeri	Mendorong peningkatan kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas DTPS dalam penyusunan proposal untuk memperoleh pendanaan penelitian luar negeri.
22	DTPS belum memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author.	Mendorong untuk publish di jurnal sinta 2	Mendorong dan memfasilitasi DTPS untuk meningkatkan publikasi pada jurnal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi melalui pendampingan, pelatihan, dan insentif publikasi.

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
23	Perguruan tinggi telah memiliki pedoman pelaksanaan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa. Namun, pedoman tersebut belum mengatur secara jelas pembagian tugas, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.	Berkoordinasi dengan LPPM untuk menambahkan poin dalam pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian	Menyempurnakan pedoman penelitian dengan pengaturan yang jelas mengenai tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, dan pihak terkait.
24	UPPS telah memiliki kebijakan penelitian. Namun, kebijakan tersebut belum diturunkan ke dalam pedoman pengelolaan penelitian yang mengatur secara operasional keempat aspek standar masukan penelitian.	Mengajukan pembuatan buku pedoman pengelolaan penelitian	Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan penelitian yang operasional
25	UPPS belum sepenuhnya menerapkan sistem TIK terintegrasi untuk mendukung seluruh aktivitas penelitian. Saat ini SIM penelitian masih dalam proses pengembangan.	Berkoordinasi dengan pusdatin terkait pembuatan	Berkoordinasi dengan PUSDATIN untuk mempercepat penyelesaian dan implementasi SIM penelitian serta memastikan seluruh penelitian terdokumentasi dan dapat diakses melalui repositori secara berkelanjutan
26	Perguruan tinggi telah menetapkan kebijakan penelitian yang mencakup kode etik, HaKI, kerja sama penelitian, serta publikasi hasil penelitian. Namun, kebijakan tersebut belum didukung oleh pedoman pengelolaan penelitian yang operasional.	Mengusulkan pembuatan pedoman pengelolaan penelitian	Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan penelitian yang operasional untuk mendukung penerapan kebijakan penelitian secara konsisten.
27	DTPS telah melaksanakan PkM dengan pendanaan dari perguruan tinggi/mandiri dan dana dalam negeri. Namun, hingga saat ini belum terdapat PkM DTPS yang didanai oleh sumber luar negeri.	Menambah sumber dana luar negeri	Mendorong penguatan kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas DTPS dalam mengakses skema pendanaan PkM luar negeri.
28	Perguruan tinggi telah menetapkan kebijakan PkM yang mencakup kode etik, HaKI, kerja sama, serta publikasi hasil PkM. Namun, kebijakan tersebut belum didukung oleh pedoman pengelolaan PkM yang bersifat operasional.	LPPM menetapkan kebijakan PkM yang memenuhi 4 aspek, yaitu a. kode etik PkM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	LPPM menyusun pedoman pengelolaan PkM yang mencakup kode etik, HaKI, kerja sama, serta publikasi hasil PkM untuk menjamin implementasi kebijakan PkM secara konsisten.
29	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman institusi yang secara jelas mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM.	LPPM membuat pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM	LPPM membuat pedoman institusi yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam pelaksanaan PkM

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
30	BeluUPPS belum memiliki pedoman pengelolaan PkM yang secara tertulis dan komprehensif mengacu pada empat aspek kebijakan PkM, meliputi penyediaan akses sarana, prasarana, dan pembiayaan, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen, penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta standar mutu masukan PkM sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi. m ada pedoman pengelolaan	UPPS memiliki kebijakan PkM yang mengacu 4 aspek	Institusi melalui LPPM perlu segera menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan PkM yang mengacu pada empat aspek kebijakan PkM, serta mensosialisasikannya kepada dosen untuk menjamin mutu dan keberlanjutan pelaksanaan PkM.
31	UPPS belum menerapkan sistem TIK terintegrasi untuk mendukung seluruh aktivitas PkM. Saat ini sistem TIK PkM masih dalam tahap pengembangan.	Berkoordinasi dalam pembuatan istem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM? Target: 1) 100% PkM terdokumentasi di sistem TIK. 2) Repositori PkM dapat diakses 24/7	Berkoordinasi dengan PUSDATIN untuk mempercepat penyelesaian dan implementasi sistem TIK PkM agar seluruh kegiatan terdokumentasi dan dapat diakses secara berkelanjutan.

C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
70.75%	29.25%	1.89%	10.38%	16.98%

Tuban, 05 January 2026

Pimpinan Auditie,



(Nurlaili Dina Hafni, M.Pd.)

Tuban, 05 January 2026

Ketua Auditor,



(Siti Nurjanah, M.Pd.I.)

Tuban, 05 January 2026

Kapus Audit,



(Irfa'i Alfian Mubaidilla, M.Pd.)